Kawula.



Pilot survey findings

Kawula.

Terbentuknya Kawula

Kawula lahir atas kekhawatiran sekaligus harapan kami, para peneliti di BOI Research, untuk meningkatkan partisipasi anak muda di arena politik. Politik yang kami bayangkan tidak melulu tentang jalur formal, tetapi juga untuk memahami pilihan politik yang termanifestasi dalam *daily life choices* masing-masing.

Untuk itulah kami menginisiasi terbentuknya Kawula. Kawula berkolaborasi dengan para peneliti, akademisi, dan organisasi lainnya yang secara aktif memantau kondisi politik Indonesia. Melalui Kawula, kami berharap anak muda dapat memahami preferensi politiknya dan mendorong terbuka kembalinya ruang-ruang diskusi di ranah publik.

Apa itu Kawula?

Kawula adalah Voting Advice Application (VAA). Dalam Kawula, para pemilih akan menentukan posisinya di masing-masing isu, yang kemudian akan diterjemahkan melalui kedekatan pilihan mereka dengan partai politik Indonesia saat ini. Pertanyaan yang diberikan dalam VAA Kawula berbasiskan isu/kebijakan yang saat ini sedang dibahas publik dan pemerintah. Contohnya mengenai isu gender, lingkungan, HAM, korupsi, dan lain-lain.

Bagaimana VAA Kawula bekerja?

Seperti VAA pada umumnya, beberapa set pertanyaan disediakan bagi para *users*. Pertanyaan-pertanyaan ini berisi isu maupun kebijakan yang saat ini sedang dibahas di DPR maupun pemerintah, serta ramai di kalangan publik. Contohnya, Omnibus Law, RUU PKS, Revisi UU KPK, dan lain-lain. Pemetaan posisi partai politik* dilakukan di masing-masing isu. Posisi ini didapatkan melalui *desk research* di portal berita maupun website DPR sendiri.

Setelah posisi-posisi partai teridentifikasi, kuesioner disebar melalui survei online untuk kalangan mahasiswa maupun mereka yang baru saja lulus (*fresh graduates*). Dari jawaban-jawaban yang terkumpul, Kawula mencoba untuk memetakan pilihan para mahasiswa/lulusan baru dengan sikap partai politik di masing-masing isu yang tersedia.



kawula17

* Partai politik merujuk pada 9 partai yang saat ini memiliki kursi di DPR RI, yaitu Partai Demokrat, Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Gerindra, Partai Golongan Karya (Golkar).

Copyright © 2021-2022 by kawula17

Siapa kami?



Dian

Selama beberapa tahun terakhir, Dian terlibat dalam banyak proyek penelitian pelanggan, terutama Brand Health Tracking. Dengan latar belakang penelitian kualitatif, Dian sangat mumpuni dalam membawa dan menerjemahkan wawasan ke analisis statistik yang tidak selalu mudah dimengerti oleh awam. Dibuktikan melalui beberapa proyek yang digawangi oleh Dian dalam bisnis makanan dan start-up.



Ingmar

Dengan lebih dari 20 tahun di dunia riset, Ingmar berpengalaman di F&B, FMCG, otomotif, serta pertanian.

Seiring dengan bertumbuhnya organisasi, prosedur dan kontrol kualitas menjadi semakin penting. Untuk memastikan kinerja terbaik, Ingmar berfokus dalam memastikan *quality control* dan prosedur di dalam organisasi, terutama berkaitan dengan analisis data.



Angel

Selama masa studinya di Politik dan Pemerintahan, Angel aktif menyuarakan isu-isu hak hewan, lingkungan, dan gender.

Sebagai peneliti, Angel dapat memahami esensi dari temuan penelitian, dan menerjemahkannya menjadi wawasan yang *actionable*. Angel juga sangat mumpuni dalam memvisualisasikan hasil penelitian kuantitatif dan kualitatif.



Yoan

Dalam beberapa tahun terakhir, Yoan terlibat dalam sebagian besar proyek penelitian sebagai pendukung bagi peneliti BOI dan pada saat yang sama mengejar gelar pendidikan di S1. Kegigihan Yoan, dibarengi ketelitian dalam analisa, membuatnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tim. Saat ini, sebagai peneliti, Yoan semakin mengambil porsi sentral sebagai data analis

Maria Angelica Christy Aka
angelicachristy@boi-rs.com
+62 811-8128-762

Copyright © 2021-2022 by kawula17

Secara umum, sikap Demokrat terhadap beberapa isu/kebijakan yang ada paling relevan dengan pandangan mahasiswa/lulusan baru saat ini.

BOI RESEARCH

Apa yang kami lakukan?

Sejak Oktober 2021, kami melakukan pilot survey di kalangan mahasiswa dan *fresh graduates*. Dari pilot survey ini, 291 *responses* terkumpul dari seluruh Indonesia dan *feedback* positif serta saran-saran terus bermunculan. Antusiasme para kawula muda membuat kami semakin yakin bahwa ruang diskusi dan *platform* edukasi politik sangat dibutuhkan saat ini, lebih-lebih dari sebelumnya.

Dalam pilot survey ini, 13 topik besar berhasil dikumpulkan. Beberapa di antaranya membahas isu korupsi dan peran KPK, HAM, kesetaraan gender dan penghapusan kekerasan seksual, dan lain-lain hingga masalah lingkungan. Topik-topik lain serta pembahasan secara lengkap dapat ditemukan di bagian "Preferensi berbasis isu".

Preferensi mahasiswa terhadap partai politik

Skor diberikan di masing-masing pernyataan (kolom kiri, netral dan kolom kanan) di setiap isunya. Tiap-tiap skor kemudian diberikan pada partai politik sesuai dengan sikap/pilihan partai di masing-masing isu. Skor inilah yang kemudian menjadi alat analisis Kawula untuk menentukan dan memetakan sikap *user*, baik secara individu maupun keseluruhan, dan preferensinya terhadap 9 partai di DPR saat ini.

Baik di level individu maupun keseluruhan, besar-kecilnya skor partai mengartikan kedekatan preferensi *user(s)* dengan pandangan partai politik di isu-isu yang tersedia.

Dari hasil pilot survey, Demokrat, Golkar, dan Nasdem menempati tiga partai politik teratas. Ini mengindikasikan bahwa pada saat ini, ketiga partai tersebut, dan terutama Demokrat, adalah partai politik yang paling relevan dengan pilihan mahasiswa/lulusan baru.

Sebaliknya, sikap PKB (26.6), PKS (26.6), PPP (26.1), dan PAN (25.5) terhadap isu-isu terpilih kurang sesuai dengan pandangan sebagian besar mahasiswa saat ini.

	Index
Demokrat	49,7
Golkar	41,9
Nasdem	38,3
PDIP	38,1

Gerindra	32,8
PKB	26,6
PKS	26,6
PPP	26,1
PAN	25,5

Copyright © 2021-2022 by kawula17

Apa temuan kami?

7 dari 10 mahasiswa sudah memiliki pengalaman dalam Pemilu, baik daerah maupun nasional, sebelumnya. Dari angka ini, jumlah mahasiswa laki-laki yang pernah memilih lebih banyak dibandingkan perempuan. Artinya, 3 dari 10 akan memilih untuk pertama kalinya (*first voter*) di tahun 2024 mendatang.

Penanganan Covid-19 dan distribusi vaksin adalah kebijakan pemerintah yang paling diketahui oleh mahasiswa saat ini. Ambisi pemerintah untuk mengonversi Taman Nasional Komodo menjadi *Jurassic park* adalah isu kedua yang paling dikenal dengan 46%.

Tingkat kepentingan tiap isu

Dari 13 topik yang diberikan dalam pilot survey, 7 dari 10 mahasiswa menganggap hak asasi manusia (HAM), pendidikan gratis dan kebebasan akademik, serta akses gratis ke fasilitas kesehatan sebagai topik yang paling penting bagi mereka saat ini. Jaminan atas pemenuhan aspek-aspek ini menjadi hal yang mereka fokuskan sekarang.

Lebih dalam lagi, laki-laki dan perempuan memiliki fokus topik yang berbeda. Sementara isu gender dan kesetaraan menjadi isu yang lebih penting bagi mahasiswa perempuan, laki-laki memiliki *concern* yang lebih beragam, di antaranya: kemerdekaan untuk provinsi, kebebasan berekspresi, isu sosial, lingkungan, dan perburuhan.

Pandangan mahasiswa mengenai isu/kebijakan saat ini

Secara umum, mahasiswa memiliki opini yang kuat di beberapa topik tertentu. Topik-topik di antaranya adalah dukungan terhadap penguatan peran KPK dalam upaya pemberatasan korupsi, mendorong kesetaraan gender dan penghapusan kekerasan seksual, pelestarian lingkungan dan mengatasi perubahan iklim, kemudian jaminan atas implementasi hak-hak pekerja. Di topik-topik ini, setidaknya 9 dari 10 mahasiswa memiliki suara yang sama.

1 dari 2 mahasiswa berpendapat bahwa orientasi seksual tidak perlu menjadi pembatas untuk saling menghargai sebagai sesame manusia. Jumlah yang sama menganggap pemerintah perlu meminta maaf atas pelanggaran HAM di masa lalu sebagai komitmen atas penegakan HAM. Sementara itu di isu sosial, konsumsi alkohol sebagai urusan privat dan perlunya kepastian bahwa KPR dapat diakses semua orang tanpa terkecuali juga mendapat dukungan oleh setengah dari seluruh mahasiswa.

Di lain isu, hampir 2 dari 5 mahasiswa mendukung Papua sebagai bagian dari Indonesia dan perlunya dorongan untuk meningkatkan produksi beras dengan memperbanyak jumlah sawah, salah satunya melalui proyek pangan di Papua.

Copyright © 2021-2022 by kawula17

Desain penelitian



Research objective

1. Memahami aspirasi mahasiswa mengenai beberapa isu yang sedang dibahas oleh pemerintah maupun DPR.
2. Untuk membantu mahasiswa mengetahui pilihan politik.



Respondents criteria

≥18 tahun
Mahasiswa atau *fresh graduate*

Methodology

Computer-assisted self interviewing (CASI)



Fieldwork period

30 September – 31 Oktober 2021



Sampling

Area: Indonesia
n = 291 respondents

Copyright © 2021-2022 by kawula17

Profil responden*

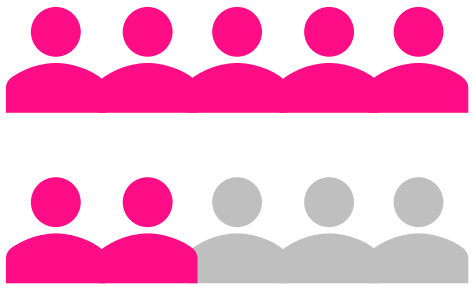
base: all, n = 291

Jenis kelamin

Laki-laki	50%
Perempuan	50%

Wilayah

Jakarta	30%
Jawa Barat	25%
Banten	10%
Jawa Timur	9%
Yogyakarta	9%



7 dari 10 mahasiswa pernah memilih dalam pemilihan nasional maupun daerah sebelumnya

Umur

18-22	62%
23-24	18%
25+	10%

Universitas asal

Univ. Gadjah Mada	19%
Univ. Indonesia	13%
Univ. Pamulang	7%
UPN Veteran Jakarta	5%
Lainnya	14%

* Based on weighted results on gender.

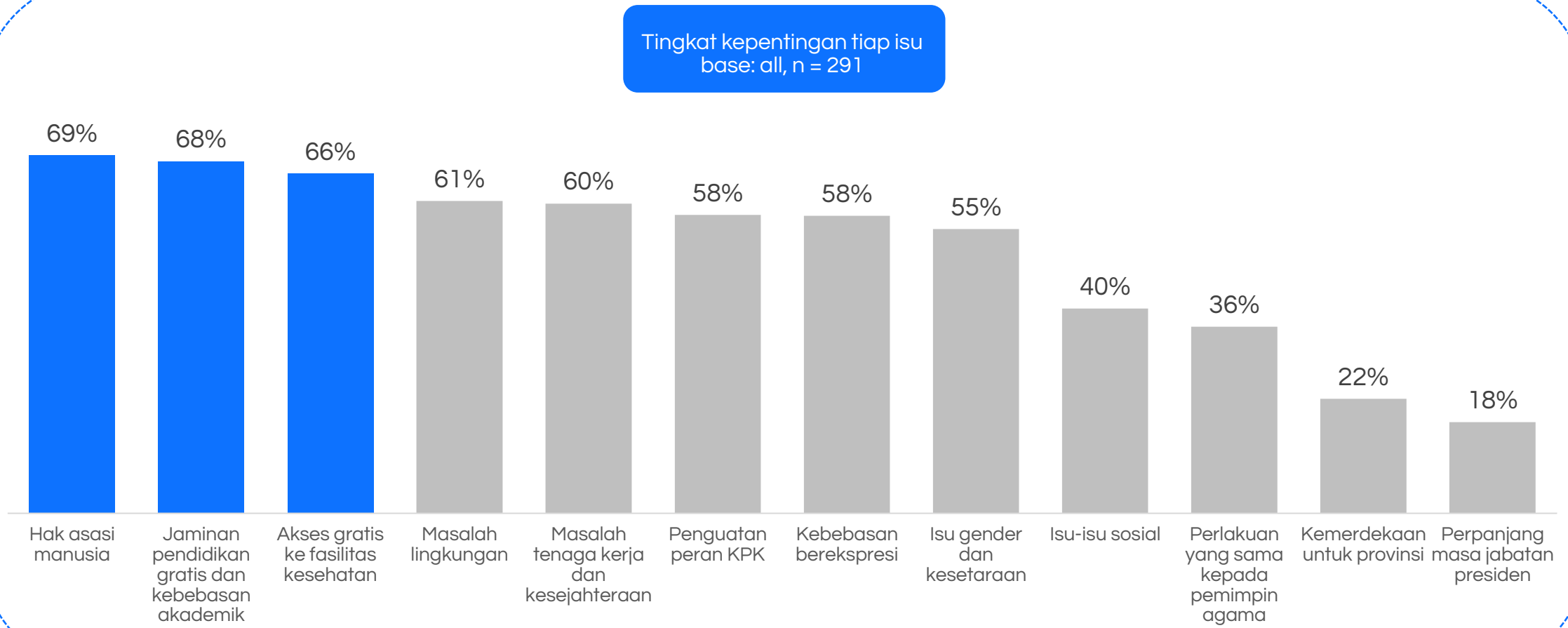
Copyright © 2021-2022 by kawula17



Preferensi berbasis isu

Copyright © 2021-2022 by kawula17

HAM, jaminan pendidikan gratis dan penelitian, serta akses gratis ke fasilitas kesehatan adalah tiga topik yang dianggap paling penting bagi mahasiswa saat ini.



Q1. Bisakah kamu menunjukkan topik mana yang paling penting bagimu secara pribadi?

Copyright © 2021-2022 by kawula17

Lebih dalam lagi, terdapat perbedaan fokus topik antara mahasiswa laki-laki dan perempuan.

Tingkat kepentingan tiap isu
base: all, n = 291

	Total	Laki-laki	Perempuan
Hak asasi manusia	69%	70%	69%
Jaminan pendidikan gratis dan kebebasan akademik	68%	73%	64%
Akses gratis ke fasilitas kesehatan	66%	70%	61%
Masalah lingkungan	61%	66%*	54%
Masalah tenaga kerja dan kesejahteraan	60%	67%*	53%
Penguatan peran KPK	58%	61%	54%
Kebebasan berekspresi	58%	64%*	52%
Isu gender dan kesetaraan	55%	49%	60%*
Isu-isu sosial	40%	49%*	30%
Perlakuan yang sama kepada para pemimpin agama	36%	38%	34%
Kemerdekaan untuk provinsi	22%	29%*	16%
Perpanjangan masa jabatan presiden	18%	21%	14%

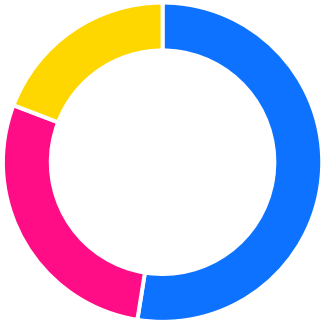
* Menandakan persentase signifikan lebih tinggi.

Isu gender dan kesetaraan adalah isu yang lebih penting bagi mahasiswa perempuan (60%) dibandingkan laki-laki (49%).

Sementara itu, isu-isu seperti kemerdekaan untuk provinsi (29%), kebebasan berekspresi (64%), sosial (49%), lingkungan (66%), dan perburuhan (67%) secara signifikan lebih penting bagi mahasiswa laki-laki dibandingkan perempuan.

Copyright © 2021-2022 by kawula17

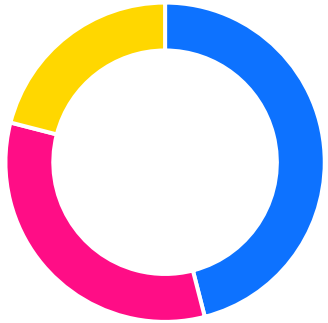
Secara umum, 1 dari 2 mahasiswa setuju bahwa orientasi seksual tidak perlu menjadi masalah dan perlu ada komitmen dari pemerintah terkait pelanggaran HAM.



52% Apapun orientasi seksualnya sebagai sesama manusia, harus menghargai satu sama lain.

19% Netral

28% Homoseksual harus mengikuti terapi guna mengubah orientasi seksualnya.



Pemerintah harus meminta maaf atas kasus 1965 dan pelanggaran hukum lainnya di masa lalu. 46%

Netral 33%

Pemerintah tidak perlu meminta maaf atas pelanggaran HAM di masa lalu. 21%

Penting: 69%

Copyright © 2021-2022 by kawula17

Terkait isu pendidikan dan penelitian, sebagian besar mahasiswa setuju dengan gagasan pendidikan gratis dan jaminan terhadap kebebasan akademik.

BOI RESEARCH



Setuju bahwa semua sekolah (negeri dan swasta), termasuk yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus*, harus disubsidi untuk mendukung pendidikan gratis.

Pendidikan & penelitian

*Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah kawasan dengan Batasan tertentu yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategis wilayah. Saat ini, terdapat 19 KEK di Indonesia yang tersebar di barat hingga timur Indonesia, salah satunya KEK Sei Mangkei di Sumatera Utara, KEK Maloy Batuta di Kalimantan Timur, dll.

Kebebasan akademik harus dijamin sehingga siapapun dapat mengakses pengetahuan dan melakukan penelitian tanpa intervensi atau pembatasan hukum.

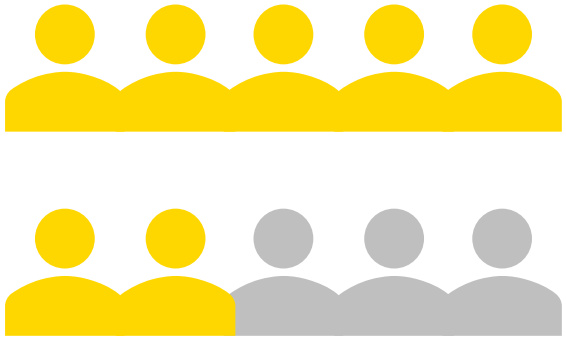


Penting: 68%

Copyright © 2021-2022 by kawula17

Mahasiswa setuju bahwa vaksin adalah hak publik. Terkait penanggulangan Covid-19, 1 dari 2 setuju bahwa pemerintah perlu meminta maaf atas manajemen yang kurang baik.

7 dari 10 mahasiswa setuju bahwa Vaksin (seperti untuk Covid-19) adalah hak publik dan tidak boleh dikomersialkan (berbayar).



Presiden perlu meminta maaf atas manajemen yang sering tidak efektif selama pandemi Covid-19. **49%**

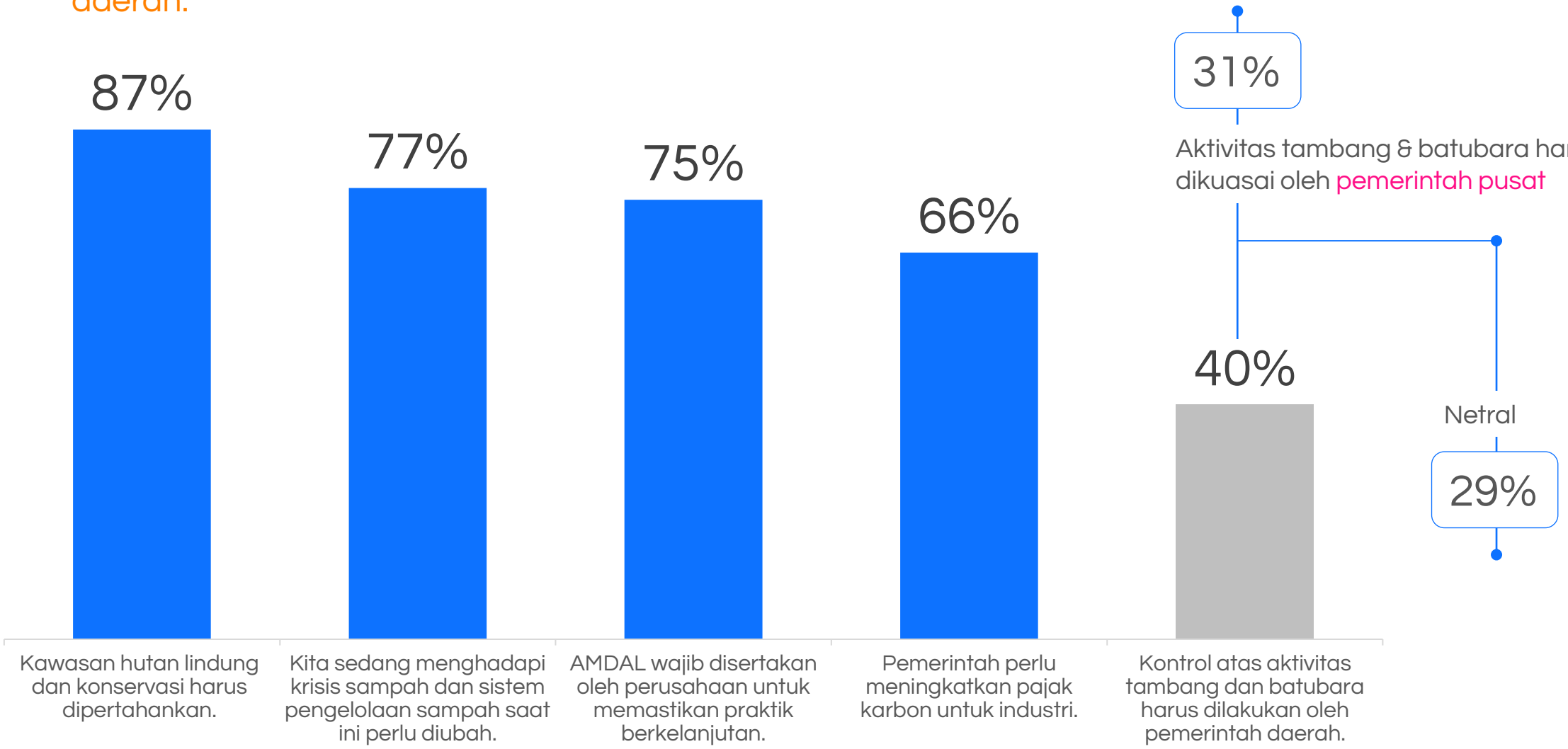
Netral **30%**

Presiden dan pemerintahannya telah menangani gelombang Covid-19 dan program vaksinasi dengan baik. **21%**

Penting: 66%

Copyright © 2021-2022 by kawula17

Umumnya mahasiswa memiliki suara yang sama mengenai lingkungan (kawasan konservasi, sistem pengelolaan sampah, dan implementasi AMDAL). Namun, hanya 2 dari 5 setuju bahwa aktivitas sumber daya ekstraksi perlu di bawah kontrol pemerintah daerah.



Penting: 61%

Copyright © 2021-2022 by kawula17

Mahasiswa secara umum memiliki opini yang kuat mengenai isu perburuhan, utamanya terkait jaminan kesejahteraan bagi pembantu rumah tangga dan hak cuti khusus.

84%

Perlu ada upaya perlindungan hukum bagi Pembantu Rumah Tangga (PRT) untuk menjamin kesejahteraan mereka.

91%

Cuti khusus adalah hak dasar bagi pekerja untuk memastikan kesejahteraan para pekerja.

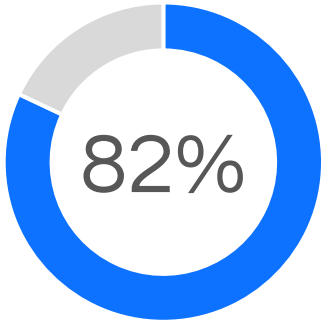
Tentang cuti khusus

Cuti khusus adalah suatu hak yang diberikan bagi karyawan jika ada keperluan penting atau mendesak yang harus di lakukan, yang tercantum pada pasal 93 ayat 4 dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

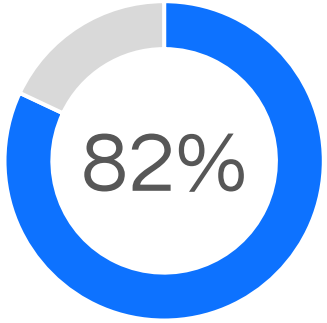
Penting: 60%

Copyright © 2021-2022 by kawula17

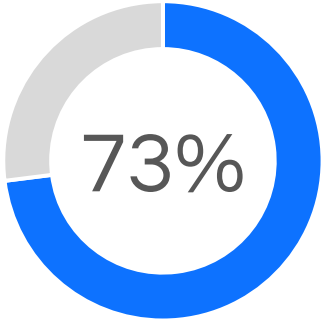
Secara umum, mahasiswa memiliki opini yang kuat mengenai posisi KPK dalam pemberantasan kasus korupsi di Indonesia.



Setuju bahwa KPK harus memiliki kewenangan lebih selama proses penyidikannya, terutama terkait korupsi politik.



Memilih untuk menerapkan penjara seumur hidup bagi koruptor



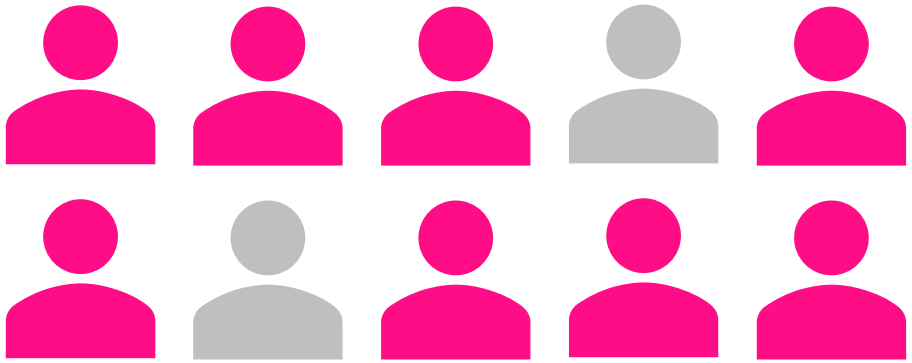
Mengatakan bahwa KPK harus tetap menjadi lembaga independen untuk memastikan ia tetap bebas dari konflik kepentingan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didirikan sejak tahun 2003 sebagai organisasi independen untuk memberantas korupsi di Indonesia. Pendirian KPK dilatarbelakangi oleh maraknya korupsi di masa Orde Baru. Baru-baru ini, muncul pembicaraan untuk mengubah peran KPK dalam upaya pemberantasan korupsi.

Penting: 58%

Copyright © 2021-2022 by kawula17

Kebebasan berekspresi dan akses terhadap internet juga mendapatkan fokus khusus dari mahasiswa.

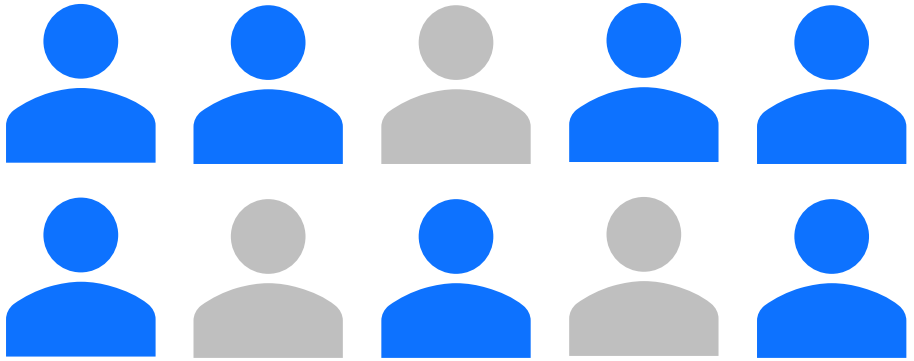


Setiap pendapat, termasuk tentang presiden, adalah bagian dari kebebasan berekspresi, sehingga tidak boleh ditekan.

82%

Pemutusan akses internet melanggar HAM karena membatasi kesempatan warga untuk bertukar informasi.

67%



Penting: 58%

Copyright © 2021-2022 by kawula17

9 dari 10 mahasiswa setuju dengan poin-poin kesetaraan gender. Mengenai aborsi, 1 dari 2 mahasiswa setuju bahwa aborsi dapat dilakukan untuk korban pemerkosaan.

BOI RESEARCH

90% Indonesia sedang menghadapi darurat isu kekerasan seksual, sehingga diperlukan undang-undang.

87% Perempuan memiliki kebebasan memilih pekerjaan sama halnya dengan laki-laki.

83% Laki-laki yang melecehkan perempuan di malam hari harus bertanggung jawab dan dihukum atas tindakannya.

49% Pengecualian untuk melakukan aborsi boleh diberikan pada korban pemerkosaan.

- **26%** Netral
- **25%** Aborsi tidak boleh diizinkan dalam keadaan apa pun.

Kekerasan seksual adalah tindakan merendahkan, menghina, menyerang terhadap kehendak seseorang dan/atau tindakan (seksual) lainnya yang menyebabkan seseorang tidak dapat memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, dll.

Penting: 55%

Copyright © 2021-2022 by kawula17

Masing-masing 1 dari 2 mahasiswa setuju bahwa penggunaan alkohol (21+) adalah urusan privat dan bahwa KPR harus dapat diakses oleh semua golongan.



53% Penggunaan alkohol untuk pribadi (usia 21+) adalah urusan privat. Pemerintah tidak perlu mengintervensi.

24% Netral

22% Alkohol merusak generasi muda, seharusnya tidak diizinkan untuk penggunaan pribadi.



KPR harus dapat diakses oleh semua orang, termasuk pekerja non-formal dan yang berpenghasilan rendah. 49%

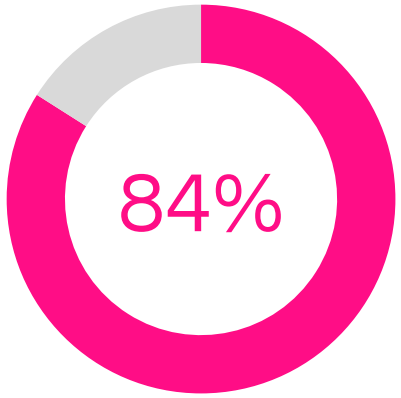
Netral 30%

KPR hanya boleh diakses oleh mereka yang berpenghasilan tetap dan kemampuan finansial lebih. 21%

Penting: 40%

Copyright © 2021-2022 by kawula17

Mengenai isu ujaran kebencian oleh pemuka agama, sebagian besar mahasiswa menganggap bahwa hal ini tidak dapat dibiarkan.



Ujaran kebencian terhadap SARA tidak boleh dibiarkan, termasuk ketika dilakukan oleh pemuka agama sendiri.

Penting: 36%

Copyright © 2021-2022 by kawula17

Posisi mahasiswa sangat terbagi ketika berbicara mengenai kemerdekaan untuk provinsi, misalkan untuk Papua Barat.

BOI RESEARCH

Sejak tahun 1961, melalui Manifesto Politik Papua Barat pada tanggal 1 Desember 1961, terdapat pergerakan dari orang Papua Barat untuk menyatakan diri sebagai Papua Barat, negara yang terpisah di luar Indonesia.

38%

Papua Barat harus tetap menjadi bagian dari Indonesia.

38%

Netral





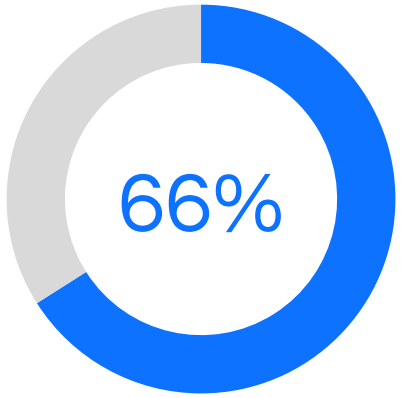
Papua Barat dapat menggunakan hak untuk menentukan nasib sendiri berdasarkan hukum internasional.

30%

Penting: 22%

Copyright © 2021-2022 by kawula17

7 dari 10 mahasiswa menganggap bahwa tidak ada presiden yang dapat dipilih lebih dari dua kali untuk meminimalisir adanya penyalahgunaan kekuasaan.



Setuju bahwa tidak ada presiden yang dapat dipilih lebih dari dua kali.

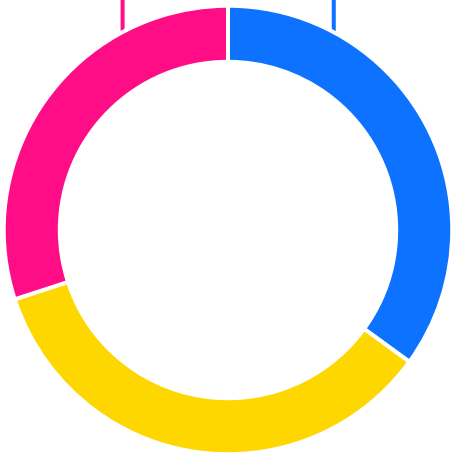
Penting: 18%

Copyright © 2021-2022 by kawula17

Sama halnya dengan kemerdekaan provinsi, opini mahasiswa sangat terbagi mengenai upaya pemerintah untuk mendorong produksi beras.

30%

Sawah saat ini cukup untuk menopang kebutuhan akan beras. Ini tidak boleh dipenuhi dengan mengorbankan lebih banyak pengalihan area hutan.



35%

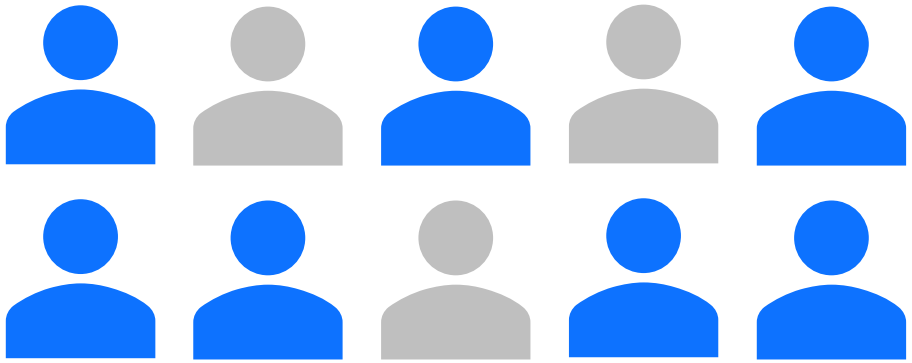
Pemerintah perlu membantu mendorong lebih banyak produksi beras, terutama melalui proyek di Papua.

35%

Netral

Copyright © 2021-2022 by kawula17

Opini mahasiswa tidak jauh berbeda pada kebijakan pemerintah untuk mempertahankan peraturan ketat dan politik bebas dan aktif.

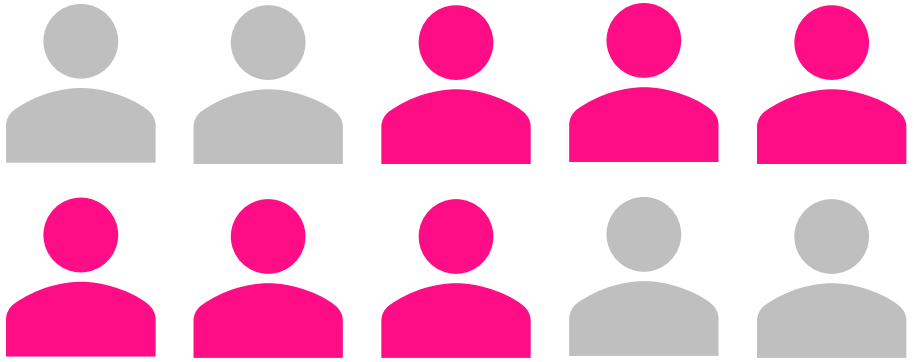


Pemerintah harus mempertahankan peraturan ketat untuk membatasi pekerja asing demi melindungi pekerja dan mendorong potensi lokal.

66%

Melalui politik bebas dan aktif, yang dapat dilakukan oleh Indonesia untuk membantu Myanmar adalah dengan melakukan diplomasi dengan ASEAN dan PBB.

63%



Copyright © 2021-2022 by kawula17

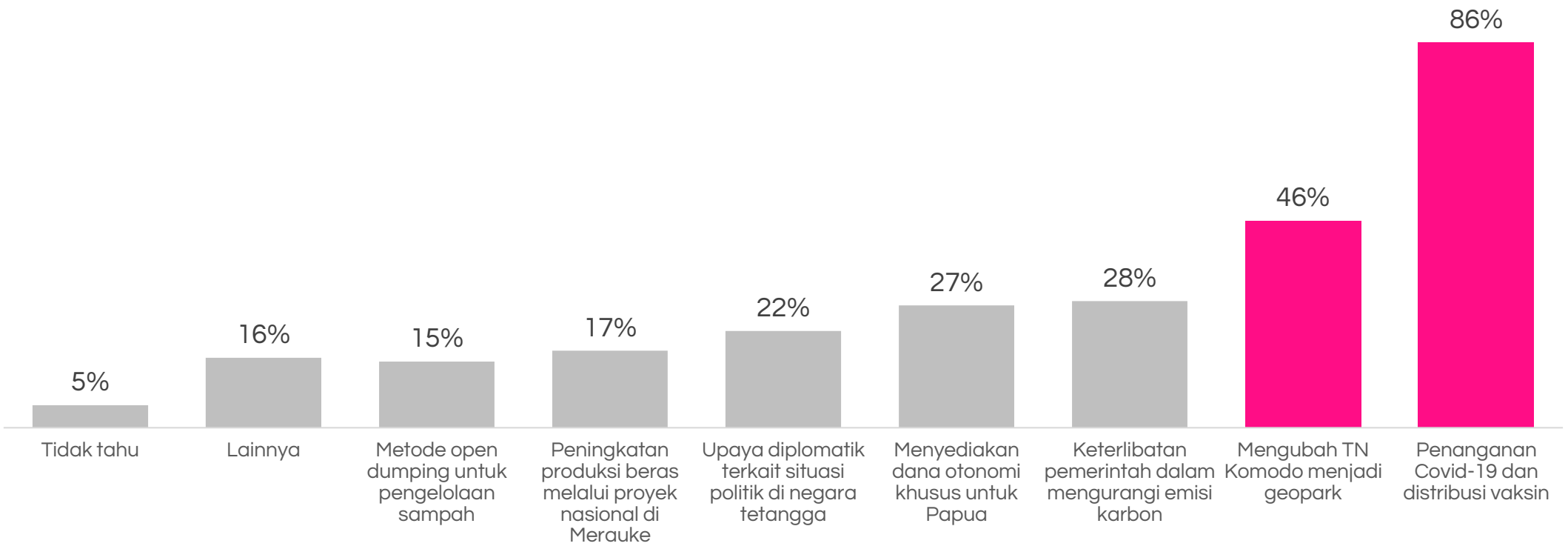


Appendix

Copyright © 2021-2022 by kawula17

9 dari 10 mahasiswa mengetahui kebijakan pemerintah dalam menangani Covid-19 dan distribusi vaksin.

Kebijakan pemerintah yang diketahui
base: all, n = 291



Q1. Bisakah kamu menunjukkan topik mana yang paling penting bagimu secara pribadi?

Copyright © 2021-2022 by kawula17

Kuesioner

S1. Apa jenis kelaminmu?
S2. Kalau umur kamu?
S3. Apa tingkat pendidikan terakhir kamu?
S3a. Kalau boleh tau, (dulu/sekarang) kamu kuliah di mana sih?
S3b. Kamu masuk di angkatan/tahun berapa sih di kampus?
S4. Di provinsi mana tempat kamu tinggal?
S5a. Apakah kamu pernah memilih dalam pemilihan nasional sebelumnya? (misalnya Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif untuk DPR)
S5b. Apakah kamu pernah memilih dalam pemilihan daerah sebelumnya? (misalnya Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Legislatif untuk DPRD, dll)
S6. Apakah kamu mengetahui isu/kebijakan di bawah ini yang menjadi fokus pemerintah?
S7. Kami mau tau dong. Kalau dengar kata Kawula, kira-kira apa sih yang ada di pikiranmu?

Copyright © 2021-2022 by kawula17

Kuesioner

A01_p	KPK harus memiliki kewenangan lebih (penyadapan, operasi tangkap tangan, dll) selama proses penyidikannya, terutama terkait korupsi politik.	Netral	Kewenangan KPK harus dibatasi. Seharusnya KPK tidak ikut campur dengan pihak kepolisian dalam proses penyelidikan.
A02_p	Hukuman maksimal penjara selama 4 tahun sudah cukup bagi koruptor.	Netral	Kita harus menerapkan penjara seumur hidup bagi koruptor.
Lembaga non-struktural adalah lembaga negara di luar organ kekuasaan pokok (eksekutif, legislatif, yudikatif).			
A03_p	KPK harus tetap menjadi lembaga independen (Lembaga Non-Struktural) untuk memastikan ia tetap bebas dari konflik kepentingan.	Netral	Untuk proses yang dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel), KPK harus berada di bawah pemerintah dan perlu ada pengawas yang ditunjuk langsung oleh presiden.

C01_p	Homoseksual harus dipaksa mengikuti pengobatan/terapi guna mengubah orientasi/ketertarikan seksual mereka.	Netral	Apapun orientasi seksualnya (heteroseksual, homoseksual, etc.), sebagai sesama manusia, kita harus menghargai satu sama lain.
C02_g	Pemerintah harus meminta maaf atas pembunuhan massal tahun 1965 dan pelanggaran hukum lainnya.	Netral	Pembunuhan massal tahun 1965 dan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia lainnya di masa lalu tidak ada hubungannya dengan pemerintahan saat ini.

B01_p	Tidak ada orang yang dapat dipilih sebagai presiden lebih dari dua kali untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan.	Netral	Dalam masa genting (misalkan saat pandemi Covid-19), seorang presiden dapat dipilih lebih dari dua kali untuk menjamin stabilitas nasional.

D01_p	Indonesia sedang menghadapi darurat isu kekerasan seksual Karenanya, diperlukan undang-undang untuk mengatasi situasi yang mengkhawatirkan ini.	Netral	Tidak perlu ada undang-undang tambahan untuk isu kekerasan seksual, undang-undang saat ini sudah cukup.
D02_p	Laki-laki yang melecehkan perempuan di malam hari harus bertanggung jawab dan dihukum atas tindakannya.	Netral	Apabila memungkinkan, aktivitas perempuan harus dibatasi di malam hari untuk menghindari pelecehan oleh laki-laki.
D03_p	Pengecualian untuk melakukan aborsi boleh diberikan pada korban pemerkosaan.	Netral	Aborsi adalah dosa dan melawan nilai-nilai agama, dan tidak boleh diizinkan dalam keadaan apa pun.
D04_p	Perempuan memiliki kebebasan untuk memilih apakah dan kapan mereka ingin bekerja, sama halnya dengan laki-laki.	Netral	Kebebasan perempuan untuk bekerja harus dibatasi untuk memastikan mereka tetap dapat mengurus keluarga.

Copyright © 2021-2022 by kawula17

Kuesioner

E01_p	Setiap pendapat, termasuk yang berhubungan dengan presiden, adalah bagian dari kebebasan berekspresi, sehingga tidak boleh dibatasi atau ditekan.	Netral	Presiden semestinya tidak boleh dikritik dan siapapun yang memberikan pendapat negatif tentang presiden harus dituntut secara hukum.
Pada tahun 2019 lalu, pemerintah memutus akses internet di Papua dan Papua Barat selama demonstrasi besar-besaran mengenai antirasisme di kedua provinsi tersebut.			
E02_g	Pemutusan akses internet (pemblokiran, pelambatan akses, dll) di Papua melanggar hak asasi karena membatasi kesempatan warga untuk mendapatkan dan memberikan informasi.	Netral	Pemutusan internet di Papua perlu dilakukan mengingat banyaknya hoax dan berita bohong yang beredar di sana.

F01_p	KPR (Kredit Pemilikan Rumah) semestinya hanya boleh diakses oleh mereka yang memiliki penghasilan tetap (karyawan tetap) dan kemampuan financial lebih karena merekalah yang dapat menulasi cicilan tersebut.	Netral	KPR harus dapat diakses oleh semua orang, termasuk pekerja non formal (PKL, pengusaha mikro dan kecil, dll) dan mereka yang berpenghasilan rendah
F02_g	Penggunaan alkohol untuk penggunaan pribadi (mereka yang berusia 21+ tahun) adalah masalah pribadi. Pemerintah tidak perlu mengintervensi hal ini.	Netral	Alkohol merusak generasi muda dan bertentangan dengan nilai-nilai agama, seharusnya tidak diizinkan untuk penggunaan pribadi.

G01_p	Ujaran kebencian terhadap suku, agama, ras, dan kelompok lainnya seharusnya tidak boleh dibiarkan. Termasuk ketika ini dilakukan oleh pemuka agama itu sendiri.	Netral	Selama berasal dari kitab suci, semua orang, termasuk pemuka agama, memiliki hak untuk mengatakan apa yang mereka inginkan, termasuk ujaran kebencian terhadap kelompok (agama, etnis, dll) lainnya.

Hak untuk menentukan nasib sendiri adalah			
H01_g	Papua Barat harus tetap menjadi bagian dari Indonesia.	Netral	Papua Barat dapat menggunakan hak untuk menentukan nasib sendiri berdasarkan hukum internasional.
Dana otonomi khusus dialokasikan oleh pemerintah guna melaksanakan otonomi khusus daerah, misalkan di Papua Barat.			
H02_p	Seharusnya, orang Papua Barat dapat menentukan nasibnya sendiri. Pemerintah sudah terlalu banyak mencampuri urusan mereka (keterlibatan militer, dll).	Netral	Pemerintah harus meningkatkan Dana Otonomi Khusus untuk membantu Papua Barat mengurangi tingkat kemiskinan, dll.

Copyright © 2021-2022 by kawula17

Kuesioner

E01_p	Seperti jenis pekerjaan lainnya, perlu ada upaya perlindungan hukum bagi Pembantu Rumah Tangga (PRT) untuk menjamin kesejahteraan mereka (gaji, jam kerja, dll)	Netral	Belum ada masalah berarti yang menimpa PRT sampai sekarang. Peraturan belum terlalu dibutuhkan karena PRT secara umum sudah bekerja dengan layak.
Contoh cuti khusus adalah cuti saat haid, cuti hamil dan melahirkan, cuti ketika anggota keluarga meninggal, dan cuti penting lainnya.			
E02_g	Cuti khusus adalah hak dasar bagi pekerja untuk memastikan kesejahteraan para pekerja.	Netral	Cuti khusus dapat dikurangi secara maksimal karena tidak bermanfaat bagi perusahaan.

Open dumping (sistem terbuka) merujuk pada sistem pengelolaan sampah dimana sampah dibuang dan dibiarkan di lahan terbuka (Tempat Pembuangan Akhir) tanpa adanya pengolahan khusus.			
J04_g	Hingga saat ini, sistem open dumping masih memadai untuk diterapkan di Indonesia	Netral	Kita sedang menghadapi krisis sampah dan sistem pengelolaan sampah saat ini perlu diubah.
Telah ada diskusi tentang pencegahan perubahan iklim di tingkat global yang juga diikuti Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengurangi konsumsi karbon kita. Di tingkat industri, upaya ini akan dilakukan dengan menerapkan pajak karbon bagi perusahaan.			
J05_g	Untuk mengurangi emisi karbon, pemerintah perlu meningkatkan pajak karbon untuk industri.	Netral	Pajak karbon buruk untuk mendukung pertumbuhan industry.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan kajian mengenai dampak positif dan negatif terhadap lingkungan hidup dari suatu proyek yang akan dilakukan. Di sisi lain, AMDAL akan digunakan pemerintah untuk menilai apakah proyek ini layak untuk dilakukan atau tidak.			
J01_p	Perusahaan harus diizinkan untuk melakukan kegiatan pembangunan apapun, meski tanpa menyertakan AMDAL, untuk mendorong pemerataan pembangunan di daerah non-Jawa.	Netral	AMDAL wajib disertakan oleh perusahaan untuk memaastikan praktik yang berkelanjutan, meskipun itu berpotensi membatasi ruang gerak perusahaan untuk melakukan pembangunan.
J02_p	Kawasan hutan lindung dan konservasi harus dipertahankan untuk melindungi ekosistem dan keanekaragaman hayati.	Netral	Kawasan hutan lindung dan konservasi harus dibuka guna menggenjot produksi pangan dalam negeri, khususnya untuk beras.
J03_p	Aktivitas tambang dan batubara di daerah seperti di Pulau Kalimantan, Bangka Belitung, dll harus dikuasai oleh pemerintah pusat untuk memastikan pengawasan yang terpusat dan terintegrasi.	Netral	Kontrol atas aktivitas tambang dan batubara harus dilakukan oleh pemerintah provinsi atau daerah karena mereka lebih memahami konteks lokal.

Copyright © 2021-2022 by kawula17

Kuesioner

K01_p	Vaksin (seperti untuk Covid-19) adalah hak publik dan tidak boleh dikomersialkan (berbayar).	Netral	Untuk mempercepat herd immunity (kekebalan), vaksin mandiri (opsi untuk membeli vaksin) harus menjadi pilihan bagi perusahaan dan orang-orang yang bersedia membayarnya.
K02_g	Presiden perlu meminta maaf atas manajemen yang sering tidak efektif selama pandemi Covid-19.	Netral	Presiden dan pemerintahannya telah menangani gelombang Covid-19 dan program vaksinasi dengan baik.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah kawasan dengan Batasan tertentu yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategis wilayah. Saat ini, terdapat 19 KEK di Indonesia yang tersebar di barat hingga timur Indonesia, salah satunya KEK Sei Mangkei di Sumatera Utara, KEK Maloy Batuta di Kalimantan Timur, dll.			
L01_p	Semua sekolah (negeri dan swasta), termasuk yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus, harus disubsidi untuk mendukung pendidikan gratis.	Netral	Lembaga pendidikan dapat menjadi badan usaha (usaha bisnis) di daerah dengan sumber daya ekonomi yang lebih banyak seperti Kawasan Ekonomi Khusus, dll.
L02_p	Kebebasan akademik harus dijamin sehingga siapa pun dapat mengakses pengetahuan dan melakukan penelitian tanpa campur tangan atau pembatasan hukum.	Netral	Siapapun dapat mengeyam pengetahuan dan penelitian selama tidak berbahaya dan mengganggu keutuhan NKRI (misalnya, penelitian tentang PKI, LGBT di Indonesia, dll.).

M01_p	Pemerintah harus mempertahankan peraturan ketat untuk membatasi pekerja asing untuk melindungi pekerjaan dan mendorong potensi lokal.	Netral	Penyerapan tenaga kerja asing harus dipermudah untuk mendorong investasi asing untuk mendongkrak perekonomian.
Sejak 1 Februari 2021, militer Myanmar mengumumkan keadaan darurat selama setahun setelah mengklaim kecurangan pemilu di seluruh negeri. Setelah kudeta ini, panglima militer mengambil alih kekuasaan yang menyebabkan protes nasional dan internasional.			
M02_g	Indonesia harus mengirim pasukan militer untuk mengintervensi langsung masalah Myanmar mengenai junta militer saat ini.	Netral	Melalui politik bebas dan aktif, yang dapat dilakukan oleh Indonesia untuk membantu Myanmar adalah dengan melakukan diplomasi dengan ASEAN dan PBB.

N02_g	Pemerintah perlu membantu mendorong lebih banyak produksi beras, terutama melalui proyek di Papua yang akan menggunakan 1,2 juta hektar.	Netral	Sawah saat ini cukup untuk menopang kebutuhan kita akan beras dan kebutuhan ini tidak boleh dengan dipenuhi dengan mengorbankan lebih banyak pengalihan area hutan.

Copyright © 2021-2022 by kawula17

Kuesioner

	Topik	Tidak penting	Netral	Penting
N01_p	Penegakan KPK (kewenangan, hukuman koruptor, pertanggungjawaban)	○	○	○
N02_p	Kemerdekaan untuk provinsi (hak untuk menentukan nasib sendiri untuk Papua Barat)	○	○	○
N03_p	Perpanjang masa jabatan presiden	○	○	○
N04_p	Hak asasi manusia (terlepas dari orientasi politik dan seksual)	○	○	○
N05_p	Masalah gender dan kesetaraan	○	○	○
N06_p	Kebebasan berekspresi (terlepas dari pendapat politik terhadap presiden, dll.)	○	○	○
N07_p	Masalah sosial (akses ke KPR, penggunaan alkohol, perlakuan yang sama kepada para pemimpin agama)	○	○	○
N08_p	Masalah lingkungan	○	○	○
N09_p	Masalah tenaga kerja dan kesejahteraan	○	○	○
N10_p	Akses gratis ke fasilitas kesehatan	○	○	○
N11_p	Jaminan pendidikan gratis dan kebebasan akademik	○	○	○

Copyright © 2021-2022 by kawula17